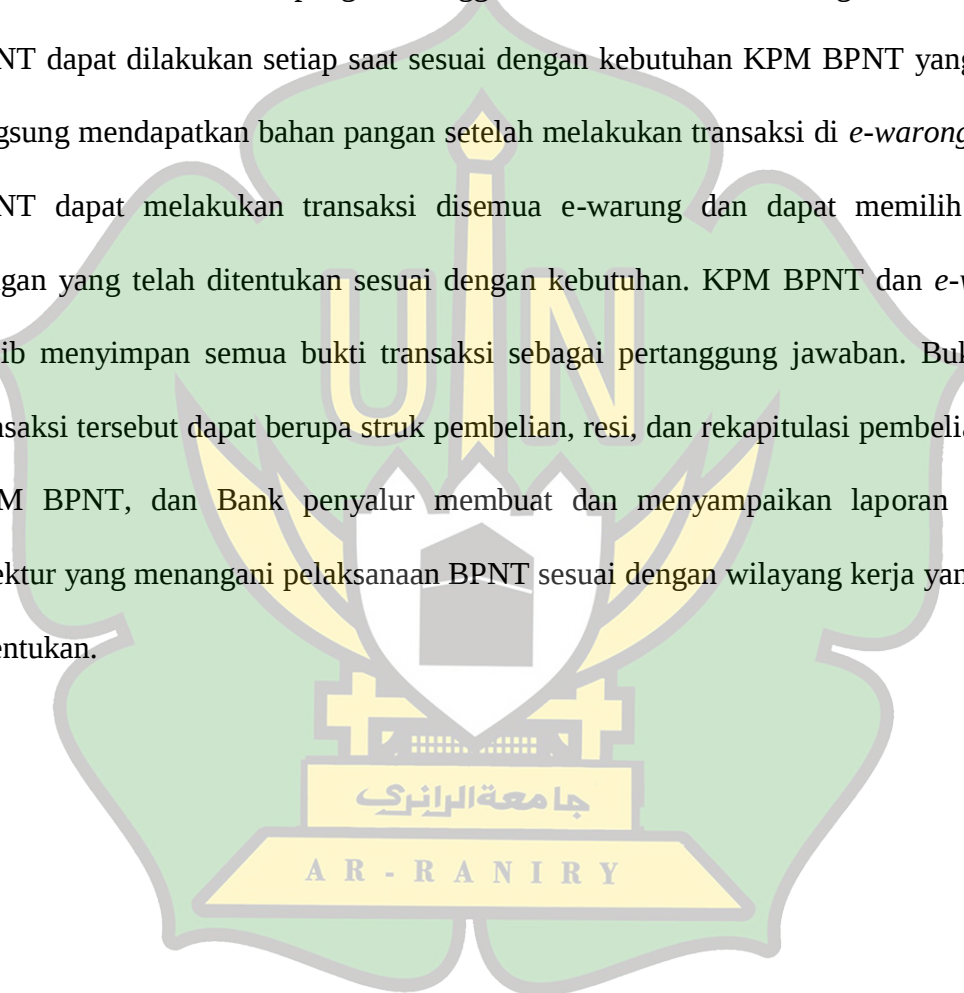


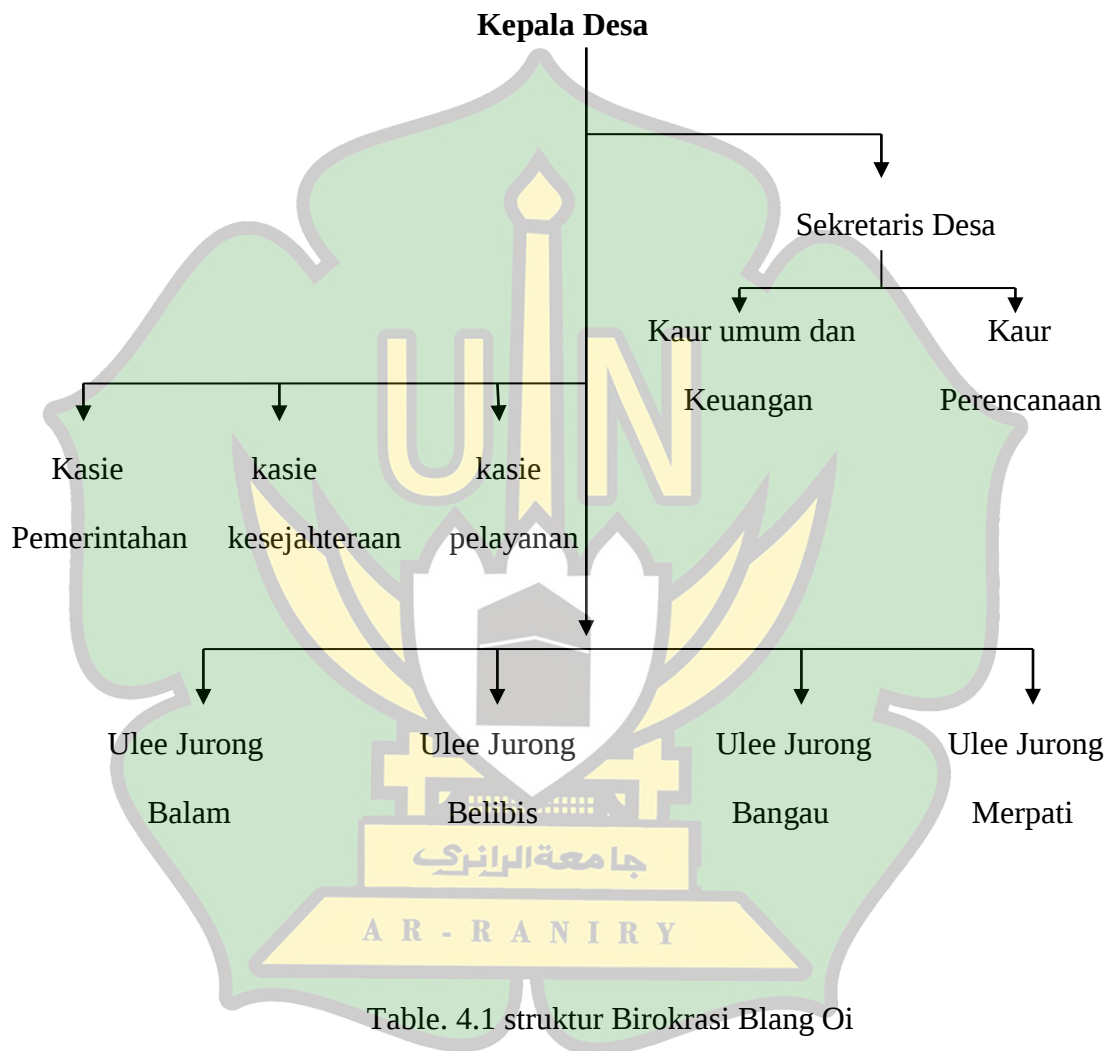
- d) Tata cara pembelian bahan pangan menggunakan dana dari rekening *e-wallet* KPM BPNT
- e) Informasi mengenai tabungan dalam rekening KPM BPNT

Pembelian bahan pangan menggunakan dana dari rekening *e-wallet* KPM BPNT dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan KPM BPNT yang harus langsung mendapatkan bahan pangan setelah melakukan transaksi di *e-warong*, KPM BPNT dapat melakukan transaksi di semua *e-warung* dan dapat memilih bahan pangan yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan. KPM BPNT dan *e-warong* wajib menyimpan semua bukti transaksi sebagai pertanggung jawaban. Bukti dari transaksi tersebut dapat berupa struk pembelian, resi, dan rekapitulasi pembelian oleh KPM BPNT, dan Bank penyalur membuat dan menyampaikan laporan kepada direktur yang menangani pelaksanaan BPNT sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan.



4. Struktur birokrasi gampong Blang Oi

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN GAMPONG BLANG OI



Menurut bapak Wuryanto menyatakan bahwa :

“Disetiap kebijakan pemerintah tidak jauh juga dari masalah terutaman pada saat pendataan. Sebenarnya telah berkali-kali diberitahukan bahwa kami aparaturnya hanya menerima data yang diberikan oleh Dinas Sosial untuk penerima bansos nya terutama di BPNT, kan bantuan ini berupa barang bukan

uang jadinya masyarakat banyak yang protes terhadap kenapa saya tidak dapat kenapa dia dapat. Kami mencoba menjelaskan mekanismenya dan kami juga member tau ke Dinas Sosial terhadap masalah ini, cuma ya mau bagaimana, proses dan proses dan prosedurnya sudah ditetapkan oleh pusat”⁹

Dalam proses memecahkan sebuah masalah kebijakan BPNT seluruh staf di gampong Blang Oi ikut andil dalam penyelesaiannya seperti yang disampaikan pak wuryanto, prosesnya menjelaskan secara terperinci terhadap masyarakat. Di gampong Blang Oi banyak terdapat penduduk pendatang yang dari luar Kota Banda Aceh yang tinggal disana. Meskipun mereka layak menerima BPNT namun tetap diutamakan data yang dulu. Meskipun begitu banyak juga masyarakat yang dulunya menerima BPNT yang sekarang sudah layak maksudnya disini sudah mampu jadi tidak mendapatkannya lagi.

4.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Program BPNT Di Blang Oi

Sebagai pemusatan dalam penyaluran BPNT gampong Blang Oi terdapat beberapa kendala dimana tidak adanya keadilan dalam pembagian bantuan pangan non tunai, jadi siapa saja terdata di dinas sosial maka itu itu saja yang mendapatkannya. Proses pendataannya pun yang menjadi syaratnya memang penduduk yang menetap di Blang Oi selama 5 tahun. Dan malahan ada yang telah mendapatkan bantuan lain seperti PKH, dia juga mendapatkan bantuan pangan non tunai yang berupa kartu yang dapat dibelanjakan di warung yang telah ditetapkan oleh Bank penyalurnya.

⁹ Hasil wawancara dengan staf bagian kaur umum & perencanaan pada tanggal 04 Maret 2020

“Dikampung ini banyak sebenarnya masyarakat yang menurut saya layak mendapatkan bantuan tersebut, tapi masyarakatnya enggan mau memberikan data yang menjadi persyaratannya, ada beberapa yang bilang terlalu ribet dan sebagainya. Malah ada yang bilang sudah mengurusnya malahan tidak keluar yang ada capek saja yang keluar itu-itu saja”¹⁰

Tidak hanya itu saja, mengenai hambatan lain seperti halnya stok barang juga menjadi faktor utama dalam bansos. Biasanya proses pemesanan barang itu dilakukan 1 hari sebelum pembagian terhadap masyarakat. Namun pada saat masyarakat memilih kebutuhan yang diinginkan namun barang tersebut sudah habis stok, sehingga menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hambatan yang didapatkan yaitu dimana pemasokan barang terkadang dibatasi dikarenakan ada beberapa masyarakat juga yang hanya mengambil 1 barang saja seperti halnya beras ada yang mengambil beras saja jadi stoknya menipis. Kalau terjadi kehabisan barang maka masyarakat yang telat mengambilnya akan menunggu proses pemesannya lagi selama 1 minggu kalau pun masyarakatnya mau mengambil bulan depan sekalian bisa juga.

“kita untuk stok Alhamdulillah lengkap, baik itu beras, telur, sayur-sayuran dan bahan lainnya, tetapi karena masyarakat bebas memilih apa yang mereka butuhkan maka terjadi juga barang habis yang paling cepat kali habis itu seperti beras dan telur. Kan sekarang uang yang dikartu e-voucher menjadi Rp 200.000 jadi ada yang mengambil beras semua dan ada juga yang mengambil telur dan beras juga. Jadi kalau terjadi seperti itu yang telat mengambil berarti wajib menunggu pesanan selanjutnya selama 1 minggu dan juga bisa diambil sekalian nanti dibilang berikutnya. Jadi dapat double”¹¹

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Geuchik Blang Oi pada tanggal 26 Februari 2020

¹¹ Hasil wawancara dengan pemilik warung “E-Warong” pada tanggal 04 Juni 2020

Selaian itu pemerintah Gampong Blang Oi sulit mendapatkan bantuan BPNT dikarenakan banyak masyarakat kurang mampu di gampong tersebut merupakan penduduk baru, tentu saja menjadi keprihatinan pemerintah gampong terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan namun semestinya masyarakat tersebut layak mendapatkan bantuan.

Jadi disini terdapat beberapa faktor yang memperhambat berjalannya program BPNT yaitu :

1. Pendataan penduduk
2. Penyediaan stok barang
3. Dan proses penyaluran barang.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian serta pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai di gampong Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kabupaten Banda Aceh. Maka dalam penelitian ini penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Keberhasilan suatu program tidak hanya dilepaskan oleh suatu lembaga saja melainkan adanya kerjasama antara lembaga pemberi sebuah kebijakan program sosial dengan aparatur desa digampong Blang Oi Masyarakat bisa memilih sesuai dengan kebutuhannya masih-masih. Sejauh ini bantuan pangan non tunai di Gampong Blang Oi berjalan dengan baik sesuai harapan pemerintah untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan transparan. Dalam lima tahun terakhir jumlah penerimaan bantuan sosial (bansos) terus berkurang digampong Blang Oi dikarenakan banyaknya masyarakat yang sudah mampu dan tidak layak untuk diberikan lagi. sedangkan yang belum mendapatkan bantuan BPNT itu merupakan pendatang dan belum didatakan oleh Dinas Sosial. Tujuan dari penyaluran bantuan sosial dan subsidi secara non tunai agar

penyalurannya memenuhi 6T yaitu : tepat sasaran, tepat administrasi, tepat jumlah, tepat manfaat, tepat waktu dan tepat kualitas.

2. Terdapatnya hambatan seperti adanya penduduk yang baru menetap di gampong Blang Oi sehingga harus di data kembali, terdapat beberapa masyarakat yang layak mendapatkan bantuan tersebut namun tidak mendapatkan haknya dan mengenai pemasokan barang, karena masyarakat bebas memilih barang yang dia inginkan jadinya yang tidak mendapatkan akan menunggu sampai pemilik warung menyediakan stok barang yang dibutuhkannya.

B. Saran

Adapun saran dari penulis mengenai implementasi kebijakan program BPNT di gampong Blang Oi meliputi :

1. Khususnya mengenai pendataan, memang dengan tidak memasukkan data yang baru bisa meminimalisirkan kemiskinan, akan tetapi setidaknya bisa dilihat juga penduduk yang berdomisili Blang Oi, telah berkeluarga dan telah menduduki selama 3 tahun yang kiranya layak diberikan bantuan sosial.
2. Perlu menyediakan stok tambahan menegani barang habis jadinya masyarakat tidak perlu menunggu terlalu lama.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ali Khomsan, dkk, 2015. *Indikator Kemiskinan dan Miklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB Bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia.
- Arifin Tahir, 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta.
- Deddy Mulyana, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Edi Suharto, 2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alvabeta.
- Hessel Nogi Tangkilisan, 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset
- Ismet Susila, 2015. *Implementasi Dimensi Layanan Public dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: CV. Budi utama.
- Leo Agustino, 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Muhammad Idrus, 2007. *metode penelitian ilmu social*. Yogyakarta, Erlangga.
- Sugiono, 2003. *Metode penelitian administrasi*, Bandung, Cv Alvabeta
- Sulastomo, 2011. *Sistem Jamainan Nasional: Mewujudkan Amanat Konstitusi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Yulianto Kadji. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan publik dalam fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.

Sumber Jurnal dan Skripsi

Ahda Sulukin Nisa, *Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam” (studi kasus di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi, 2019, Fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas islam Negeri Raden intan lampung.

Akib, Haedar Dan Antonius Tarigan, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, (Universitas Pepabari Makassar.

Eko Yudianto Yunus, *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo*, Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panca Marga Probolinggo, 2019, Volume 9 Nomor 2

Nadira Ilma, *Implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kota Sukabumi (studi kasus kecamatan Citamiang)*, Skripsi, 2019, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sukabumi (Ummi).

Taufiqurakhman, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), tahun 2014.

Sumber Penerbitan Pemerintah dan Lembaga

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Pedoman Khusus Pengelolaan Pengaduan Bantuan Sosial Pangan*. Jakarta tahun 2018.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, *Pedoman Pelaksanaan Bantuan pangan Non tunai*. Jakarta tahun 2017

Kementerian sosial Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai*, No. 06/4/PER/HK.01/08/2018 Jakarta Pusat, tahun 2018.

Sumber Surat Kabar atau Majalah

BPS, Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi 2017-2019, diakses pada 4 Oktober 2019 dari situs

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/1549/persentase-penduduk-miskin-pada-september-2018-sebesar-9-66-persen.html>.

Data jumlah KPM Kota Banda Aceh, 2019 diakses pada 7 Desember 2019 dari situs

<http://data.bandaacehkota.go.id/index.php/dataset/jumlah-penerima-bantuan-pangan-non-tunai-bpnt-per-kecamatan/resource/ff6af341-59bd-49ed-87fd-cf928ff81b67>

Implementasi Kebijakan BPNT, diakses pada tanggal 27 Januari 2020 pada situs [Http://digibli.uinsgd.ac.id](http://digibli.uinsgd.ac.id)

Kenali lebih dekat program bantuan pangan non tunai di akses pada 6 Januari 2020 pada situs: <http://www.kemsos.go.id/>

M. Tafiqqurahman, Aceh termiskin di Sumatra, detik news, 15 Januari 2019 <https://news.detik.com/berita/d-4385686/aceh-provinsi-termiskin-di-sumatera>

Peraturan menteri sosial Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 di akses pada 06 Januari 2020 pada situs : <http://pusdatin.kemensos.go.id>

Website Kota Banda Aceh, *Wali Kota Banda Aceh Luncurkan Bantuan Pangan Non Tunai*, diakses pada 7 Desember 2019 dari situs <https://bandaacehkota.go.id/berita/9581/wali-kota-banda-aceh-luncurkan-bantuan-pangan-non-tunai.html>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 738/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **12 Desember 2018**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Dr. Mukhlisah, MA.
2. Zakki Fuad Khalil, S.I.P., M.Si.
Untuk membimbing skripsi :
Nama : Zulbaidah
NIM : 150802008
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 27 Maret 2019
An. Rektor
Dekan,


Ernita Dewi

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921

Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-458/Un.08/FISIP /PP.00.9/02/2020

14 Februari 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

di-

Tempat

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Zubaidah
NIM : 150802008
Jurusan : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul : Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Lokasi Penelitian : - Dinas Sosial Kota Banda Aceh.
- Keuchik Gampong Blang Oi

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Dekan,

Ernita Dewi



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN MEURAXA
GAMPONG BLANG OI

Jl. Dr. Zainoel Abidin, Email : gampongblangoi01@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474 / 0743

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUDI AGUSTIANSYAH, S.E**
Jabatan : Sekretaris Gampong Blang Oi Kecamatan Meuraxa
Kota Banda Aceh.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ZUBAIDAH**
NIM : 150802008
Jurusan : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Jenis Kelamin : Perempuan

1. Benar yang bersangkutan telah melakukan Penelitian dengan Judul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)"** guna memperlancar Penelitian sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bahwa yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian tersebut seperti yang dimaksud pada point 1, dengan catatan tidak bertentangan dengan Syariat Islam dan peraturan lainnya.
3. Demikian Surat Keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 14 Desember 2020

An. **KEUCHIK GAMPONG BLANG OI**
SEKRETARIS GAMPONG

YUDI AGUSTIANSYAH, S.E





PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888. Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id). Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 157

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Membaca : Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B/458/Un.08/FISIP/PP.00.9/02/2020 Tanggal 14 Februari 2020 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Zulbaidah

Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Lr. Coklat No. 2 Gp. Lamugob, Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Pekerjaan : Mahasiswi

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Bagaimana Kebijakan yang Dibuat Pemerintah dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (Pengumpul dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : - Dinas Sosial Kota Banda Aceh
- Gampong Blang Oi Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh

Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) Bulan

Bidang Penelitian : -

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Ernita Dewi (Ketua Program Studi)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 18 Februari 2020

جامعة الرانري
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
A R - R KOTA BANDA ACEH,


Drs. T. Samsuar, M.Si

Pembina Utama Muda / NIP. 19660327 198603 1 003

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.

DOKUMENTASI



**Wawancara dengan ibu Hani
di Staf Dinas Sosial bagian
Bantuan Pangan Non Tunai**



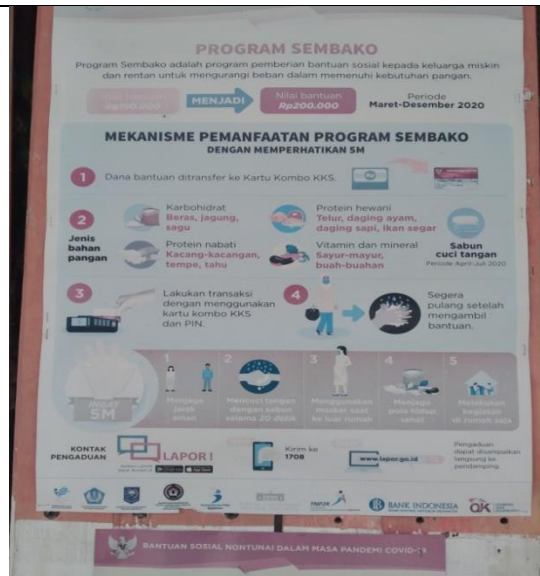
**Wawancara dengan Geuchik
gampong Blang Oi Bapak
Ardiansyah**



**Wawancara dengan tim
koordinasi tingkat gampong
Blang Oi, Kec. Meuraxa bapak
Wuryanto staf bagian kaur
umum dan perencanaan**



**Wawancara dengan pemilik E-
warong di Gampong Blang Oi
kec. Meuraxa, Kota Banda
Aceh**



Gambar 1.
mekanisme pemanfaatan
program sembako gampong
Blang Oi Kec. Meuraxa Kota
Banda Aceh



Gambar 2.
Warung penyalur BPNT (E-
warong) di gampong Blang Oi
kec. Meuraxa kota Banda
Aceh



Gambar 3.
Kartu Penerima Bansos BPNT
dan PKH GAMPONG Blang
Oi kec. Meuraxa Kota Banda
Aceh.